



ANALISIS INDEKS KESALEHAN SOSIAL SEBAGAI PANDUAN ETIKA: STUDI KASUS PADA ASN

Akhmad Amirudin^{1)*}; Eva Fadilah Ramadhani²⁾

¹⁾ *akhmadamirudin@ub.ac.id, Universitas Brawijaya*

²⁾ *evafadr@gmail.com, Universitas Brawijaya*

Abstract

This study aims to analyze the social piety index as an ethical guide in the context of the Civil Servants (ASN). The method uses a quantitative approach by involving civil servants as respondents in several government agencies. Variables involved include personal values, motivations, religious beliefs or beliefs, work environment, organizational culture, social pressures, as well as demographic factors. This study uses quantitative analysis to understand the level of social piety among civil servants, the factors that influence the practice of social piety, and its impact on the effectiveness of public services and public trust in bureaucracy. It is hoped that the results of this study will provide a deeper view of the role of social piety in public administration and can support sustainable policy formulation to improve integrity and better public services in the future.

Keywords: *Civil Servants, Regression Analysis, Social Piety*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks kesalehan sosial sebagai panduan etika dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan ASN sebagai responden di sejumlah instansi pemerintah. Variabel yang terlibat mencakup nilai-nilai personal, motivasi, keyakinan agama atau kepercayaan, lingkungan kerja, budaya organisasi, tekanan sosial, serta faktor-faktor demografis. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk memahami tingkat kesalehan sosial di kalangan ASN, faktor-faktor yang memengaruhi praktik kesalehan sosial, dan dampaknya pada efektivitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih dalam tentang peran kesalehan sosial dalam administrasi publik dan dapat mendukung perumusan kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: Analisis Regresi, Aparatur Sipil Negara, Kesalehan Sosial

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik merupakan syarat untuk mencapai tujuan masyarakat dari setiap negara (Mansoor, 2021). Upaya ini tercantum pada TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut pasal 3 TAP MPR, asas-asas umum penyelenggaraan negara termasuk kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan ini, sistem pertanggungjawaban yang dapat diukur dan diakui diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan beroperasi secara efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab (Carlisle & Gruby, 2019). Selain itu, penyelenggaraan ini harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Pratama *et al.*, 2019).

Agama merupakan ketentuan ketuhanan yang menjadi pedoman hidup bagi para penganutnya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap agama memiliki sistem kepercayaan, peribadatan, dan keimanannya masing-masing (Chopra, 2022). Dalam berhubungan dengan Tuhan, seseorang melakukan ibadah, yaitu suatu kegiatan yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu ibadah individual dan ibadah sosial (Irmu *et al.*, 2022). Secara umum, ibadah individual merupakan suatu ibadah yang memberikan manfaat hanya kepada diri sendiri saja (Sedikides & Gebauer, 2021), sedangkan ibadah sosial merupakan ibadah yang dapat memberikan manfaat ke kehidupan sosial masyarakat (Sumardin *et al.*, 2021). Berlandaskan dari ibadah sosial, kemudian memunculkan konsep kesalehan sosial yang dipakai pada penelitian ini. Dalam pengertiannya, kesalehan sosial, terdiri dari kesalehan yang berarti ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, dan sosial berarti kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kesalehan sosial merupakan



perilaku kesalehan yang memberikan manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat (Muhibbin *et al.*, 2022).

Mengukur Indeks Kesalehan Sosial di masyarakat menjadi penting karena di dalam masyarakat itu sendiri terdapat banyak pemeluk agama yang plural dengan latar belakang yang berbeda (Muhibbin *et al.*, 2022). Kemajemukan masyarakat dengan agama yang berbeda, menjadi suatu hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana kehidupan sosial di dalamnya berjalan (Prasetiawati, 2020). Oleh sebab itu, dengan adanya pengukuran Indeks Kesalehan Sosial dapat menggambarkan seberapa besar pengaruh kesalehan terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menjadi data penting dalam kebijakan pembangunan di bidang sosial dan keagamaan (Suyadi *et al.*, 2019).

Kesalehan sosial merujuk pada perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitas sosial yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Prayitno *et al.*, 2020). Dalam konteks administrasi publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan layanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Khairani *et al.*, 2023). Salah satu aspek yang sangat relevan dalam menjalankan peran tersebut adalah kesalehan sosial. ASN sebagai bagian integral dari pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga kesalehan sosial sebagai contoh yang diikuti oleh masyarakat.

Penelitian terdahulu dalam domain kesalehan sosial dan administrasi publik telah memberikan pemahaman yang berharga tentang peran penting kesalehan sosial dalam birokrasi. Sebagai contoh, penelitian oleh Muhibbin *et al.* (2022) menunjukkan bahwa ASN yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat cenderung memiliki praktik kesalehan sosial yang lebih tinggi. Temuan serupa juga didukung oleh studi oleh Haldorai *et al.* (2020) yang menyoroti pengaruh positif keyakinan agama terhadap sikap dan perilaku etis di tempat kerja. Selain itu, dalam penelitian oleh Alanazi (2013), budaya organisasi yang mendorong nilai-nilai etika dan moral diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam membentuk tingkat kesalehan sosial di lingkungan birokrasi. Hasil-hasil penelitian ini memberikan landasan penting untuk penelitian kami yang bertujuan untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesalehan sosial ASN dan dampaknya pada administrasi publik, serta mengeksplorasi konteks Indonesia yang mungkin memiliki karakteristik unik dalam hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks kesalehan sosial sebagai panduan etika dalam konteks ASN. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan melibatkan ASN sebagai responden di sejumlah instansi pemerintah. Variabel yang terlibat mencakup nilai-nilai personal, motivasi, keyakinan agama atau kepercayaan, lingkungan kerja, budaya organisasi, tekanan sosial, kebijakan, serta faktor-faktor demografis. Penelitian ini akan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami tingkat kesalehan sosial di kalangan ASN, faktor-faktor yang memengaruhi praktik kesalehan sosial, dan dampaknya pada efektivitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih dalam tentang peran kesalehan sosial dalam administrasi publik dan dapat mendukung perumusan kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merujuk pada komitmen individu atau kelompok dalam bertindak sesuai dengan norma-norma etika, moral, dan norma sosial dalam konteks interaksi sosial mereka (Saputra *et al.*, 2024). Menurut Pabbajah *et al.* (2019), kesalehan sosial adalah sikap dan tindakan yang menggabungkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, integritas, kebaikan, dan perilaku yang sesuai dengan standar etika yang diterima masyarakat.



Ini juga mencakup komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga keadilan, dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Kesalehan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek individu, tetapi juga berkaitan dengan peran individu atau kelompok dalam membentuk norma sosial dan memelihara integritas dalam lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, kesalehan sosial sering diasosiasikan dengan etika, moralitas, dan norma sosial yang menjadi panduan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap benar dan baik dalam masyarakat (Prayitno *et al.*, 2020). Konsep ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai konteks, termasuk di dalam administrasi publik, bisnis, dan masyarakat secara umum. Kesalehan sosial adalah landasan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan individu, serta dalam memastikan bahwa tindakan dan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai etika yang dianut oleh masyarakat (Helmi & Sari, 2021).

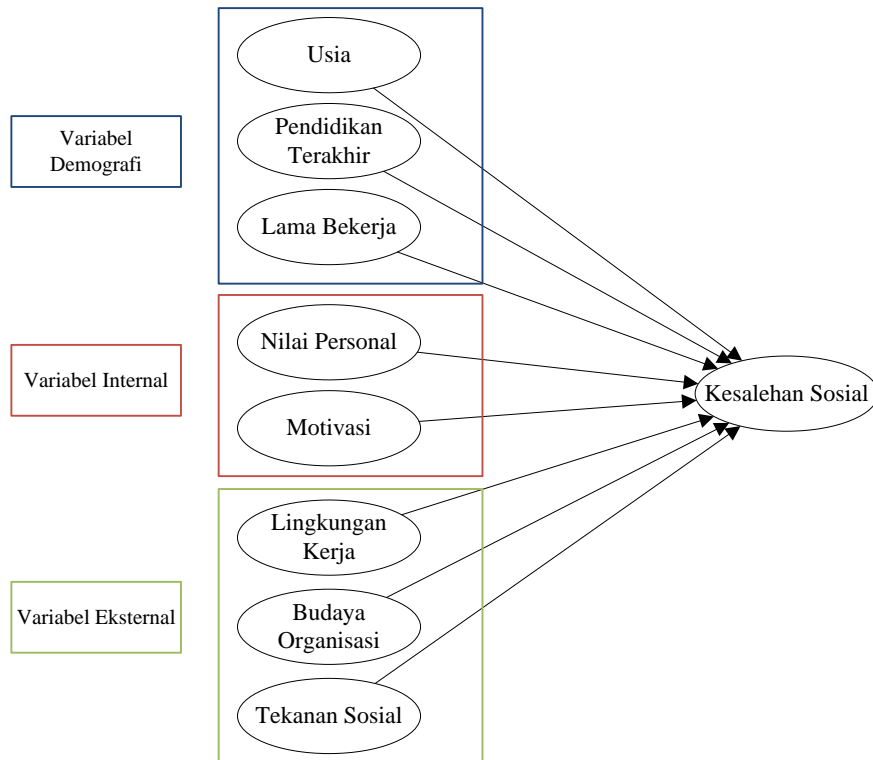
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN memiliki peran penting dalam masyarakat karena ASN adalah bagian pemerintahan yang menjaga tatanan sosial, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah, dan menyelenggarakan berbagai layanan publik (Rosenbloom *et al.*, 2022). ASN bertanggung jawab dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta memberikan layanan publik yang efektif dan efisien (Muhammad & Husen, 2019). Selain itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Dalam peran ini, mereka menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan pemerintah direalisasikan dengan baik untuk kepentingan semua (Khanal *et al.*, 2022).

Selain peran fungsional mereka, ASN juga memiliki peran sebagai *Agent of Change* (Manole & Alpopi, 2015). Dalam hal ini, ASN diharapkan menjadi contoh dalam menjalankan praktik kesalehan sosial. Ini mencakup berperilaku sesuai dengan norma-norma etika dan moral, menjaga integritas, dan bertindak dengan kejujuran dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. ASN harus menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal kesalehan sosial, memperlihatkan komitmen mereka pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial (Mériade & Qiang, 2015). Dengan menjadi teladan dalam kesalehan sosial, ASN dapat memengaruhi perilaku dan norma sosial di masyarakat secara lebih luas, menciptakan lingkungan yang lebih etis, transparan, dan bermoral. Dalam hal ini, ASN bukan hanya pelaksana tugas, tetapi juga pemegang nilai-nilai etika yang mewujudkan integritas dan etika dalam pelayanan publik.

MODEL

Model penelitian terdiri dari tiga kelompok variabel: variabel demografi, variabel internal, dan variabel eksternal. Variabel internal mencakup nilai pribadi dan motivasi, dan variabel eksternal mencakup usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Dalam model ini, setiap variabel independen dihubungkan dengan variabel dependen "Kesalehan Sosial" melalui garis panah yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap tingkat kesalehan sosial individu. Tujuan dari model ini adalah untuk menemukan dan mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap tingkat kesalehan sosial ASN. Dengan mempertimbangkan aspek internal, eksternal, dan demografi, pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang mempengaruhi kesalehan sosial ASN di Indonesia.



Gambar 1. Model Penelitian

- H1: Usia berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial
- H2: Pendidikan Terakhir berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial
- H3: Lama Bekerja berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial
- H4: Nilai Personal berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial
- H5: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial
- H6: Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial
- H7: Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial
- H8: Tekanan Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kesalehan Sosial

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data. ASN adalah subjek dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang bertujuan untuk mengukur faktor-faktor yang memengaruhi dan tingkat kesalehan sosial ASN. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik: 1) Statistika Deskriptif dan 2) Analisis Regresi. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori:

1. Variabel Demografis
 - a) Usia: Penelitian menilai apakah usia memengaruhi tingkat kesalehan sosial.
 - b) Pendidikan Terakhir: Faktor ini dievaluasi untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman dan praktik kesalehan sosial.
 - c) Lama Bekerja sebagai ASN: Penelitian menentukan apakah pengalaman kerja mempengaruhi kesalehan sosial.
2. Variabel Internal
 - a) Nilai Personal: sejauh mana nilai-nilai moral dan etika pribadi responden memengaruhi perilaku kesalehan sosial mereka.
 - b) Motivasi: mengukur tingkat motivasi individu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang mencerminkan kesalehan sosial.



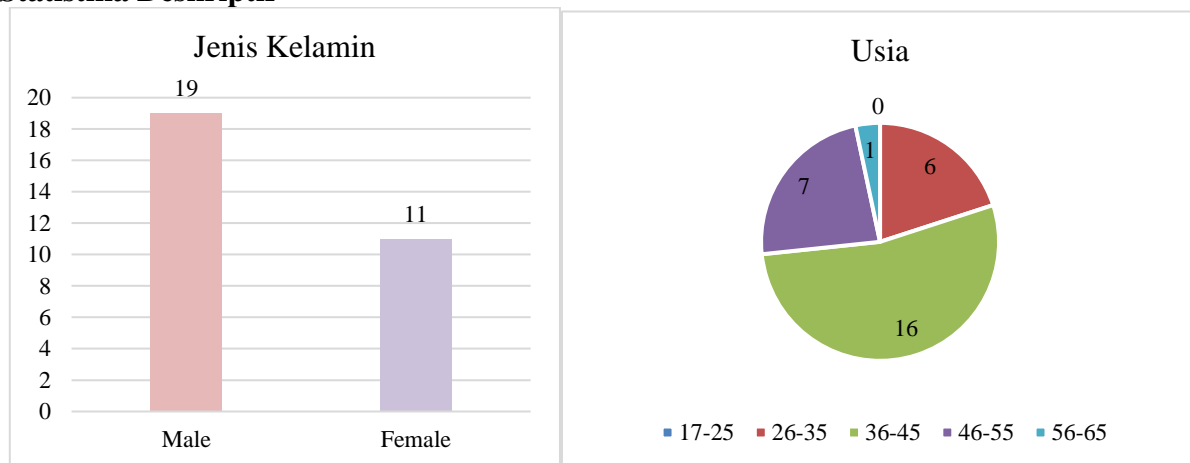
3. Variabel Eksternal:

- a) Lingkungan Kerja: Penelitian menyelidiki sejauh mana lingkungan kerja yang mendukung etika dan moral memengaruhi perilaku kesalahan sosial ASN.
- b) Budaya Organisasi: Faktor ini dipelajari untuk mengidentifikasi pengaruh budaya organisasi terhadap praktik kesalahan sosial.
- c) Tekanan Sosial: Penelitian memeriksa sejauh mana tekanan dari rekan kerja atau atasan memengaruhi keputusan ASN dalam melaksanakan praktik kesalahan sosial.

Pada langkah analisis data, statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang distribusi responden. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan sosial ASN diidentifikasi melalui analisis regresi. Hasil analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang variabel yang paling berpengaruh dalam membentuk tingkat kesalahan sosial ASN. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan, manajer publik, dan praktisi administrasi publik dalam usaha mereka untuk meningkatkan integritas, efektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif



Gambar 2. Statistika Deskriptif

Data penelitian digambarkan dan diuraikan menggunakan statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 19 responden berjenis kelamin laki-laki dan 11 responden berjenis kelamin perempuan. Dari segi usia, responden dapat dikelompokkan berdasarkan rentang usia yang berbeda. Kelompok usia 26-35 tahun diwakili oleh 6 responden, sementara kelompok usia 36-45 tahun memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu sebanyak 16 orang. Sebanyak 7 responden termasuk dalam kelompok usia 46-55 tahun, sedangkan hanya 1 responden berusia 56-65 tahun. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran yang jelas mengenai komposisi responden berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, yang akan menjadi dasar penting dalam analisis data dan interpretasi hasil penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis statistik, penting untuk memeriksa asumsi yang mendasari model regresi. Asumsi-asumsi ini mencakup linieritas hubungan antar variabel, non-multikolinieritas, normalitas distribusi sisaan, dan homoskedastisitas. Pertama, uji Ramsey RESET digunakan untuk menguji linieritas hubungan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai p adalah 0,8066, yang melebihi tingkat signifikansi $\alpha=0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel eksogen dan endogen adalah linier. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis regresi linier adalah tepat.



Selanjutnya, pemeriksaan non-multikolinieritas dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel eksogen, memiliki nilai VIF yang kurang dari 10, menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikolinieritas di antara variabel-variabel ini. Dengan demikian, asumsi non-multikolinieritas dalam model dianggap terpenuhi.

Pengujian normalitas sisaan dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sisaan dari model regresi linier berganda adalah normal; hasilnya menunjukkan nilai p sebesar 0,4735, yang melebihi tingkat signifikansi $\alpha=0.05$. Terakhir, pengujian homoskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa ragam sisaan adalah homogen; hasilnya menunjukkan nilai p sebesar 0,3946, yang melebihi tingkat signifikansi $\alpha=0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keyakinan tentang homoskedastisitas tepat.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi-asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi telah memenuhi asumsi klasik analisis regresi. Oleh karena itu, model yang dihasilkan dianggap valid dan reliabel untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis

Analisis dilakukan untuk mengkaji faktor dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (kesalehan sosial). Dalam situasi di mana variabel lainnya dianggap tetap, uji parsial (uji t) digunakan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap kesalehan sosial. Tabel 1 menunjukkan hasil uji t, yang menunjukkan koefisien regresi dan signifikansi statistik masing-masing variabel independen terhadap kesalehan sosial. Analisis ini sangat penting untuk memahami peran relatif masing-masing variabel dalam mempengaruhi kesalehan sosial ASN.

Tabel 1. Uji Hipotesis

H	Pengaruh antar Variabel		Koefisien	Nilai p	Keputusan
1	Umur	→ Kesalehan Sosial	0.002	0.007	Diterima
2	Pendidikan Terakhir	→ Kesalehan Sosial	-0.122	0.132	Ditolak
3	Lama Bekerja	→ Kesalehan Sosial	0.007	0.597	Ditolak
4	Nilai Personal	→ Kesalehan Sosial	0.617	0.001	Diterima
5	Motivasi	→ Kesalehan Sosial	0.186	0.201	Ditolak
6	Lingkungan Kerja	→ Kesalehan Sosial	0.241	0.000	Diterima
7	Budaya Organisasi	→ Kesalehan Sosial	0.091	0.000	Diterima
8	Tekanan Sosial	→ Kesalehan Sosial	-0.149	0.003	Diterima

Sumber: Author (2023)

Hipotesis 1

Dalam hipotesis pertama, diduga terdapat pengaruh positif yang signifikan dari usia terhadap tingkat kesalehan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien usia adalah 0,002 dengan nilai p sebesar 0,007. Nilai p yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($\alpha=0,05$) mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan kesalehan sosial. Dengan kata lain, semakin tua usia individu, semakin tinggi tingkat kesalehan sosial yang mereka tunjukkan. Meskipun koefisiennya sangat kecil, hubungan yang signifikan ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, terjadi peningkatan kesalehan sosial yang kecil tetapi signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Chou (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman hidup dan pemahaman spiritual yang lebih baik membuat orang yang lebih tua memiliki tingkat kesalehan sosial yang lebih tinggi.



Hipotesis 2

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kesalahan sosial. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien tingkat pendidikan adalah -0,122 dengan nilai p sebesar 0,132. Nilai p yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan dan kesalahan sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan sosial seseorang tidak berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan mereka. Pendidikan umumnya dianggap sebagai faktor penting dalam membentuk perilaku sosial (Shmueli *et al.*, 2014). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara tingkat pendidikan seseorang dan kesalahannya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan korelasi tidak signifikan ini termasuk fakta bahwa pendidikan formal tidak selalu mencakup aspek moral dan etika yang terkait langsung dengan kesalahan sosial. Selain itu, individu dapat memperoleh nilai-nilai moral dan etika dari sumber lain selain pendidikan formal, seperti pengalaman hidup, agama, atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan lingkungan sosial (Barsky, 2019).

Hipotesis 3

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan koefisien sebesar 0.007 dan nilai p sebesar 0.597. Karena nilai p lebih besar di atas 0.05, maka pengaruh lama bekerja terhadap kesalahan sosial tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis ini ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan sosial seseorang tidak secara signifikan dipengaruhi oleh lama bekerja. Pengalaman kerja tidak berkorelasi langsung dengan kesalahan sosial, meskipun dapat memberikan wawasan dan pengembangan pribadi. Faktor yang dapat menyebabkan hubungan yang tidak signifikan ini salah satunya adalah bahwa pengalaman kerja tidak selalu mencakup aspek moral dan etika yang langsung terkait dengan kesalahan sosial (Kamil *et al.*, 2010). Selain itu, lingkungan kerja yang mungkin tidak mendukung prinsip moral dan etika juga dapat mempengaruhi hubungan antara lama bekerja dan kesalahan sosial.

Hipotesis 4

Hipotesis keempat menduga adanya pengaruh positif yang signifikan dari nilai-nilai personal terhadap kesalahan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien nilai-nilai personal adalah 0,617 dengan nilai p sebesar 0,001. Nilai p yang lebih rendah dari $\alpha=0,05$ mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nilai-nilai personal dan kesalahan sosial. Dengan kata lain, ASN dengan nilai-nilai personal yang kuat cenderung memiliki tingkat kesalahan sosial yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai-nilai personal ASN mencerminkan prinsip moral dan etika yang mereka anut, dan orang-orang dengan nilai personal yang kuat cenderung bertindak dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai mereka (Neo *et al.*, 2023).

Hipotesis 5

Dalam hipotesis kelima, diduga terdapat pengaruh motivasi terhadap kesalahan sosial. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien motivasi adalah 0,186 dengan nilai p sebesar 0,201. Nilai p yang lebih tinggi dari $\alpha=0,05$ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari motivasi terhadap kesalahan sosial. Hasil ini disebabkan oleh fokus utama motivasi yang berbeda antara individu. Meskipun motivasi mungkin mendorong seseorang untuk bertindak secara sosial, seperti membantu orang lain atau berpartisipasi dalam kegiatan amal, motivasi itu sendiri tidak secara langsung berkorelasi dengan kesalahan sosial. Hasil ini sesuai dengan teori dari Rhodes dan Courneya (2004) yang menjelaskan bahwa motivasi individu tidak secara langsung berkorelasi dengan perilaku sosial individu, tetapi dapat mempengaruhi perilaku sosial melalui perencanaan perilaku dan pengawasan diri.

Hipotesis 6

Hipotesis keenam menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kesalahan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien lingkungan kerja adalah 0,241 dengan nilai p sebesar



0,000. Nilai p yang lebih rendah dari $\alpha=0,05$ mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja yang positif dan tingkat kesalehan sosial yang lebih tinggi. Ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai moral dan etika (Kuenzi *et al.*, 2020). Jika ini terjadi, karyawan dapat menjadi lebih berperilaku sosial yang baik. Misalnya, jika perusahaan menekankan kerja sama, saling menghormati, dan saling mendukung, karyawan cenderung berinteraksi dengan baik satu sama lain.

Hipotesis 7

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kesalehan sosial. Koefisien organisasi adalah 0,091 dan nilai p adalah 0,000, dengan nilai p yang lebih rendah dari $\alpha=0,05$ menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesalehan sosial. Budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kesalehan sosial. Tamunomiebi dan Ehior (2019) juga menyatakan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral ke dalam budaya kerja memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesalehan sosial di antara karyawannya. Dengan demikian, pada saat nilai-nilai moral dan etika ditekankan dalam budaya organisasi, ASN cenderung menginternalisasikan nilai-nilai dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Hipotesis 8

Hipotesis terakhir didapatkan hasil regresi dengan koefisien -0.149 dan nilai p 0.003, tekanan sosial menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesalehan sosial. Hipotesis yang diterima mengindikasikan bahwa tekanan sosial memengaruhi kesalehan sosial. Koefisien yang negatif dapat dijelaskan dengan bahwa semakin tinggi tekanan sosial yang dirasakan seseorang, semakin rendah kesalehan sosialnya. Faktor yang kompleks dalam interaksi sosial dapat menyebabkan hal ini terjadi (Sorokin & Richard, 2017). Tekanan sosial menyebabkan konflik internal bagi seseorang antara mengikuti norma sosial dan prinsip moral diri sendiri (McDonald & Crandall, 2015). Misalnya, seseorang mungkin merasa terbebani untuk bertindak sesuai dengan harapan sosial tertentu meskipun prinsip atau nilai mereka bertentangan. Ini dapat menyebabkan dilema moral. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengelola tekanan sosial dan stres untuk tetap berperilaku baik di lingkungan sosial.

Selain dilakukan uji parsial, penelitian ini juga menggunakan uji simultan. Uji simultan, atau uji F, digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel independen yang diuji secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kesalehan Sosial). Untuk uji F, hasil nilai p sebesar 0.000 diperoleh dalam analisis ini, yang jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan variabel independen yang diuji secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesalehan sosial ASN. Dengan kata lain, temuan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesalehan sosial ASN secara keseluruhan.

Kebaikan Model

Nilai R-kuadrat (R^2) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan dalam model. Dalam konteks penelitian ini, nilai R^2 sebesar 0.6859 menunjukkan bahwa sekitar 68.59% variasi dalam variabel "Kesalehan Sosial" dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi. Ini adalah indikasi yang baik karena nilai R^2 yang tinggi mengindikasikan bahwa model regresi dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam kesalehan sosial ASN.

Dengan demikian, model ini secara efektif menggambarkan kontribusi dari variabel independen terhadap kesalehan sosial ASN. Namun, perlu diingat bahwa masih ada sekitar 31.41% variasi dalam kesalehan sosial yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model



atau oleh asumsi yang tidak terpenuhi. Meskipun begitu, nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model ini memadai dalam menjelaskan dan memahami hubungan antara variabel-variabel yang telah diteliti dalam konteks kesalehan sosial ASN.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Pertama, faktor-faktor seperti usia, nilai-nilai personal, lingkungan kerja, budaya organisasi, dan tekanan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesalehan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berkontribusi positif maupun negatif terhadap tingkat kesalehan sosial ASN. Namun, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan motivasi tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kesalehan sosial.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran terkait dengan kesalehan sosial ASN. Pertama, penting untuk memperhatikan dan memperkuat nilai-nilai personal yang berkaitan dengan kesalehan sosial dalam pengembangan ASN. Kedua, organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan budaya organisasi yang mendukung praktik kesalehan sosial. Ketiga, perlu adanya kebijakan yang mengurangi tekanan sosial yang dapat menghambat praktik kesalehan sosial. Terakhir, penelitian lebih lanjut dan pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kesalehan sosial ASN bisa menjadi langkah yang berpotensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan etika kerja di dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alanazi, T. M. B. (2013). *The interrelationships among business ethics, organisational culture and attitudes towards strategic growth alternatives of Muslims' SMEs in the UK*. University of Birmingham.
- Barsky, A. E. (2019). *Ethics and values in social work: An integrated approach for a comprehensive curriculum*. Oxford University Press.
- Carlisle, K., & Gruby, R. L. (2019). Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons. *Policy Studies Journal*, 47(4), 927–952. <https://doi.org/10.1111/psj.12212>
- Chopra, M. R. (2022). *A Study of Religions*. Anuradha Prakashan.
- Chou, T. (2015). Dissociation, Paranormal Belief, and Quality of Life in Older People. *SAGE Open*, 5(4), 215824401562134. <https://doi.org/10.1177/2158244015621347>
- Haldorai, K., Kim, W. G., Chang, H. (Sean), & Li, J. (Justin). (2020). Workplace spirituality as a mediator between ethical climate and workplace deviant behavior. *International Journal of Hospitality Management*, 86, 102372. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102372>
- Helmi, M., & Sari, N. P. (2021). Implementation of the Synergy of Transformational-Servant Leadership Character in Islamic Boarding School. *Journal of Leadership in Organizations*, 3(2), 173–192.
- Irimi, I. Y., Maulana, E. R., Saepulloh, S. P., Prasetyo, A., Asbari, M., Novitasari, D., & Purwanto, A. (2022). Adaptation of Student Socio-Religious Rituals and Practices during a Pandemic. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(5), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v1i5.229>
- Kamil, M., Osman-Gani, A., Sulaiman, M. B., & Ahmad, K. (2010). Implications of piety (Taqwa) on organizational citizenship behavior (OCB) from Islamic perspective: A study of professionals in Southeast Asia. *In 9th International Conference of the Academy of*



HRD (Asia Chapter), 166–181.

- Khairani, Sri Arnetti, & Fikri Hasan. (2023). The Implementation of Competency Development of State Civil Apparatus in The Framework of Fulfilling The Rights of Civil Servants In West Sumatra Province. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 176–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1210>
- Khanal, R., Gupta, A. K., & Bhattarai, P. C. (2022). Civil servants' integrity in public sector: the case of Nepal. *Heliyon*, 8(12), e12632. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12632>
- Kuenzi, M., Mayer, D. M., & Greenbaum, R. L. (2020). Creating an ethical organizational environment: The relationship between ethical leadership, ethical organizational climate, and unethical behavior. *Personnel Psychology*, 73(1), 43–71. <https://doi.org/10.1111/peps.12356>
- Manole, C., & Alpopi, C. (2015). Agents of change in the public sector in Romania. *Management Research and Practice*, 7(2), 20–33.
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- McDonald, R. I., & Crandall, C. S. (2015). Social norms and social influence. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 3, 147–151. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.04.006>
- Mériade, L., & Qiang, L. Y. (2015). Public values on the public/private boundary: the case of civil servant recruitment examinations in China. *International Review of Administrative Sciences*, 81(2), 282–302. <https://doi.org/10.1177/0020852314546581>
- Muhammad, M., & Husen, L. O. (2019). State Civil Apparatus in Indonesia in the Conception of Welfare State: A Study of Legal Material Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus. *Asian Social Science*, 15(3), 64. <https://doi.org/10.5539/ass.v15n3p64>
- Muhibbin, Z., Sutikno, S., Soedarso, S., Ahmad, I. S., & Sari, N. I. (2022). Social Piety Index for Character Development in Indonesia: A Case Study Of Mojokerto. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.15429>
- Neo, S., Grimmelikhuijsen, S., & Tummers, L. (2023). Core values for ideal civil servants: Service-oriented, responsive and dedicated. *Public Administration Review*, 83(4), 838–862. <https://doi.org/10.1111/puar.13583>
- Pabbajah, M., Abdullah, I., Juhansar, J., & Jubba, H. (2019). Contested socioreligious reality: An-Nadzir, a non-mainstream Islamic movement in Indonesia. *The International Journal of Religion and Spirituality in Society*, 9(2), 71–78.
- Prasetiawati, P. (2020). The Role of Religious Harmony Forum for Maintain Religious Life in Palangka Raya. *Proceedings of the First International Conference on Christian and Inter Religious Studies, ICCIRS 2019, December 11-14 2019, Manado, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2302093>
- Pratama, P. E., Kamil, M., & Salahudin, S. (2019). Implementation of the Integrity Zone Development Program towards a Corruption-Free Area and a Serving Clean Bureaucracy Region. *Journal of Local Government Issues*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.22219/LOGOS.Vol2.No2.134-148>
- Prayitno, J., Sumardjoko, B., Apriyadi, H., Nasucha, Y., Sutopo, A., & Ratih, K. (2020). The progressivist value of character education regarding social piety of K.H.A. Dahlan's teachings in Sang Pencerah's novel: A prophetic socio-pragmatic study. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(6), 66–90.
- Rhodes, R., & Courneya, K. (2004). Differentiating motivation and control in the Theory of Planned Behavior. *Psychology, Health & Medicine*, 9(2), 205–215. <https://doi.org/10.1080/13548500410001670726>



- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. Routledge.
- Saputra, S., Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, A. (2024). Boundary Works as a Mechanism For Forming Collective Identity in The Indonesian Middle Class Muslim Social Piety Movement. *Ilomata International Journal of Social Science*, 5(1), 14–32. <https://doi.org/10.52728/ijss.v5i1.1061>
- Sedikides, C., & Gebauer, J. E. (2021). Do religious people self-enhance? *Current Opinion in Psychology*, 40, 29–33. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.08.002>
- Shmueli, E., Singh, V. K., Lepri, B., & Pentland, A. (2014). Sensing, Understanding, and Shaping Social Behavior. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.1109/TCSS.2014.2307438>
- Sorokin, P., & Richard, M. P. (2017). *Social and Cultural Dynamics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315129433>
- Sumardin, A., Sultan, L., Said, N., & Ridwan, M. S. (2021). Social Relationships in Congregational Prayers Toward Social Life in Makassar City During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Diskursus Islam*, 9(2), 355.
- Suyadi, S., Sumaryati, S., Hastuti, D., Yusmaliana, D., & Rahmah MZ, R. D. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8307>
- Tamunomiebi, M. D., & Ehior, I. E. (2019). Diversity and Ethical Issues in the Organizations. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i2/5620>